

Pengaruh Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Wonggarasi Barat Kec. Lemito Kab. Pohuwato

Zainun Botutihe¹, Fahrudin Zain Olilingo², Mentari Rizki Sawitri Pilomonu³

^{1,2,3}Universitas Negeri Gorontalo

nunbotutihe02@gmail.com¹, fzo@ung.ac.id², mentari@ung.ac.id³

ABSTRACT

Village financial management is an activity that includes planning, implementation, administration, reporting, and financial accountability, which is conducted through transparency, accountability, participation, systematic, and discipline. This study aimed to determine the influence of village financial management on infrastructure development in Wonggarasi Barat Village, Lemito Sub-District, Pohuwato Regency. This study used a descriptive quantitative method obtained from distributing questionnaires to the community in Wonggarasi Barat Village, Lemito Sub-District, Pohuwato Regency. The 80 samples in this study were determined through the Solvin formula with the purposive sampling technique. The analysis technique in this study used a statistical t-test and an adjusted R square test. The results disclosed that village financial management had a positive and significant effect on infrastructure development, although it had a low quality of human resources (HR) among the community and the village government. In addition, distrust towards the village government in managing funds from the central government somehow hindered the management, the community still considers that the government is not transparent in managing the village funds.

Keywords : *Village Financial Management, Infrastructure Development.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Wonggarasi Barat Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, sumber data diperoleh dari penyebaran kuesioner pada masyarakat di Desa Wonggarasi Barat Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan perhitungan rumus solvin dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* sejumlah 80 responden. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan uji-t statistik, dan uji koefisien determinasi (*adjusted R square*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan infrastruktur, akan tetapi masih terdapat beberapa masalah seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di kalangan masyarakat dan pemerintah desa. Selain itu, terdapat kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam mengelola dana yang berasal dari pemerintah pusat. Masyarakat sering merasa bahwa pemerintah desa tidak transparan dalam penggunaan dana desa.

Kata kunci : Pengelolaan Keuangan Desa, Pembangunan Infrastruktur.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, disebutkan bahwa desa mempunyai sumber pendapatan berupa asli desa, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi

daerah kabupaten/kota, alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, serta lain-lain pendapatan desa yang sah. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 telah menetapkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberi sumber kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimiliki guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur memiliki peranan yang sangat penting dalam mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga berperan kunci sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi di suatu negara, yang tidak dapat berjalan optimal tanpa adanya fasilitas infrastruktur yang memadai. Infrastruktur yang berkualitas adalah prasyarat penting, dan investasi dalam infrastruktur juga merupakan hal yang positif. Investasi tersebut mencakup biaya yang secara langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi, yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan serta disparitas dalam pelayanan publik antara berbagai wilayah desa.

Pembangunan di pedesaan mencakup dua aspek utama, yaitu pembangunan fisik dan non-fisik. Pembangunan fisik merujuk pada pembangunan yang secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat atau yang terlihat secara visual, seperti infrastruktur, bangunan, dan fasilitas umum. Di sisi lain, pembangunan non-fisik merupakan upaya pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri dan memiliki dampak jangka panjang. Pembangunan non-fisik ini mencakup peningkatan ekonomi masyarakat desa dan peningkatan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Pembangunan desa menurut Rahman dkk (2018), merupakan upaya pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah pedesaan. Tujuan utama dari pembangunan desa adalah mengurangi tingkat kemiskinan yang ada dengan melibatkan kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat setempat. Melalui kolaborasi ini, pembangunan dilakukan secara mandiri oleh desa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, baik di daerah pedesaan maupun daerah terpencil. Dalam upaya mendukung pembangunan desa, pemerintah pusat menyediakan anggaran pembangunan desa yang kemudian disebut dana desa. Dana desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Desa adalah dana yang bersumber dari APBN dan diperuntukkan bagi desa yang disalurkan melalui APBD kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan pemerintahan, mencapai pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan desa baik dalam hal infrastruktur maupun kesejahteraan masyarakat, perlu disesuaikan dengan berbagai faktor termasuk permasalahan yang dihadapi, potensi sumber daya yang ada, masukan dan aspirasi dari masyarakat, serta prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Penggunaan dana desa memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang efektif. Perencanaan pembangunan desa harus sejalan dengan rencana pembangunan tingkat kabupaten/kota untuk

memastikan keseimbangan dalam pembangunan. Saat melaksanakan pembangunan, penting untuk memastikan bahwa itu sesuai dengan rencana yang telah dibuat, sementara aparat pemerintah bersama masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan agar pembangunan sesuai dengan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan.

Desa Wonggarasi Barat, yang berada di Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato, merupakan salah satu desa yang menerima dana desa setiap tahun. Dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah sering menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di kalangan masyarakat. Di samping itu, terdapat kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam mengelola dana yang berasal dari pemerintah pusat. Banyak warga merasa bahwa pemerintah desa tidak transparan dalam penggunaan anggaran desa dan kurang memberikan laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan dana yang telah diterima.

Proses pembangunan di desa ini juga memiliki tahapan-tahapan tertentu, namun sebagian masyarakat tidak mengetahuinya, yang menimbulkan pertanyaan mengenai kinerja pemerintah desa. Peran kepala desa sebagai penggerak dalam memobilisasi aparat desa dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pembangunan yang telah direncanakan atau disepakati dalam rapat desa sangat penting. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah desa dapat menjalankan perannya dengan sungguh-sungguh untuk memastikan kemajuan yang lebih baik bagi desa tersebut. Berikut data pembangunan tahun 2019-2021 :

Tabel 1. Daftar Pembangunan Desa Wonggarasi Barat kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato Tahun anggaran 2019-2021

No	Tahun Anggaran	Deskripsi Kegiatan	Jumlah	Rencana Biaya
1	2019	Pembangunan rehab rumah	6 unit	Rp.105.000.000,00
		Pembuatan sumur gali	5 unit	Rp.68.000.000,00
		Pembangunan MCK	10 unit	Rp.90.000.000,00
		Sub Total		Rp.263.000.000,00
2	2020	Pembangunan rehab rumah	6 unit	Rp.105.000.000,00
		Pembangunan bak jemuran jagung	12 X 16	Rp.43.000.000,00
		Sub Total		Rp.148.000.000,00
		Pembangunan rehab rumah	6 unit	Rp.90.000.000,00

3	2021	Sub Total	Rp.90.000.000,00
		Jumlah Total	Rp.501.000.000,00

Data pembangunan di Desa Wanggarasi Barat Kecamatan Lemito, seperti yang tertera dalam Tabel 1.1 menunjukkan fluktuasi selama periode 2019 hingga 2021, Terdapat penurunan anggaran pada tahun 2021. Pada tahun 2021, terlihat korelasi antara anggaran dan realisasi, namun ketimpangan anggaran terjadi karena beberapa faktor. Pertama, meskipun kebijakan dasar telah diterapkan melalui musdus dan musrembangdes, namun pelaksanaannya belum mencukupi karena hanya diikuti oleh sebagian masyarakat. Kedua, strategi seperti kejelasan sasaran dan program, serta tujuan yang jelas, ditujukan untuk kepentingan masyarakat bukan individu pemerintah, tetapi belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Ketiga, pengorganisasian dalam pembagian tugas dan sumber daya belum efektif karena penggunaan sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya. Keempat, meskipun perencanaan telah diatur melalui musdus dan musrembangdes, pelaksanaannya belum sesuai rencana karena pengerjaan terkesan lambat. Terakhir, pencapaian tujuan dari kebijakan belum sepenuhnya memuaskan semua pihak masyarakat. Maka dari permasalahan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ Pengaruh Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Wonggarasi Barat Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato ”. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Wonggarasi Barat Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Wonggarasi Barat Kec. Lemito Kab. Pohuwato dan waktu pelaksanaannya pada bulan Mei 2024. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian metode kuantitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2019:16-17), metode kuantitatif dapat di definisikan sebagai pendekatan penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme dan digunakan untuk menyelidiki atau meneliti suatu populasi atau sampel tertentu. Pada penelitian ini yang menjadi variabel independent (X) yaitu Pengelolaan dana desa sedangkan variabel (Y) yaitu pembangunan infrastruktur, dengan desain penelitian yaitu melihat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

Dalam penelitian ini, populasi terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan Desa, Kepala Dusun dan Masyarakat Desa Wonggarasi Barat. Jumlah total penduduk di Desa Wonggarasi Barat adalah 1.423 orang. Jenis sampel dalam penelitian ini adalah sampel non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dalam pengambilan sampel dari populasi yang besar, peneliti melakukan perhitungan sampel dengan menggunakan rumus Solvin, sehingga didapatkan sebanyak 405

kepala keluarga. Dalam penelitian ini, digunakan jenis data primer. Data primer merujuk pada sumber data yang diperoleh langsung dari subjek atau responden oleh pengumpul data, sesuai dengan penjelasan Sugiyono (2019:194). Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner (angket). Menurut Sugiyono (2019:199), kuesioner atau angket merupakan metode pengumpulan data yang efisien ketika peneliti memiliki pemahaman yang jelas tentang faktor-faktor yang akan diukur dan dapat memperkirakan respons yang mungkin diterima dari para responden. Analisis dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari sumber intern perusahaan melalui hasil kuesioner yang disebar. Prosedur yang dilakukan meliputi penilaian terhadap hasil kuesioner dan pengolahan data menggunakan metode statistik SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil/Result

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Berikut ini adalah hasil dari pengujian normalitas data. Berdasarkan hasil pengujian terhadap data yang diperoleh, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

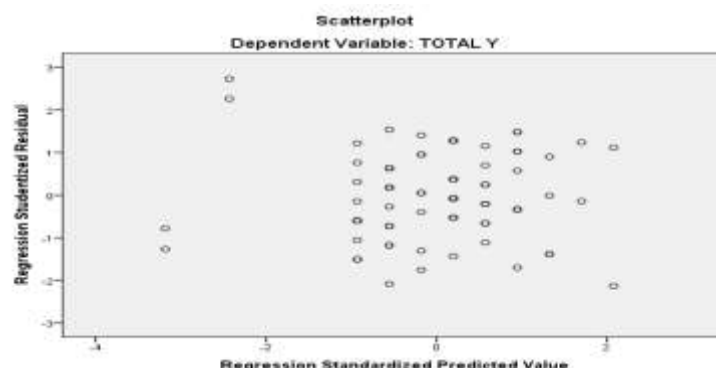
Tabel 2. Hasil Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		80
Normal Parameters a,b	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,21265899
Most Extreme Differences	Absolute	,056
	Positive	,056
	Negative	-,055
Test Statistic		,056
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200c,d

Sumber : Data primer yang di olah, SPSS 2024

Berdasarkan hasil pengujian diatas diperoleh nilai kolmogorov-Smirnov Z sebesar 0,056 dengan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) atau probabilitas sebesar 0,200 yang berada diatas 0,05 seperti yang telah disyaratkan. Sehingga demikian dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

2. Uji Heteroskedastisitas



Dari hasil analisis pada gambar diatas dapat dilihat bahwa seluruh titik-titik menyebar diatas maupun dibawah angka nol dan penyebaran titik-titik serta tidak berpola sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

1. Analisis Regresi Linier Sederhana

Tabel 3. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Sederhana

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	26,517	3,160		,000
	Pengelolaan Keuangan desa	,284	,094	,323	,003

Berdasarkan hasil analisis diatas, model regresi linear sederhana adalah sebagai berikut: $\hat{Y} = 26,517 + 0,284X$. Persamaan hasil perhitungan koefisien regresi sederhana di atas memperlihatkan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial. Dari persamaan di atas dapat diperoleh kesimpulan :

- Nilai kostanta pada persamaan regresi berdasarkan perhitungan statistik di atas adalah sebesar 26,517. Hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel independen (pengelolaan Keuangan desa) adalah konstan (nilai $X=0$), maka pembangunan infrastruktur (Y) sebesar 26,517.
- Koefisien Regresi Variabel X (Pengelolaan Keuangan desa) sebesar 0,284 atau sebesar 28,4% menunjukkan bahwa pengaruh pengelolaan Keuangan desa (X) adalah positif atau searah, artinya jika pengelolaan dana desa mengalami peningkatan sebesar satu persen, maka nilai pembangunan infrastruktur (Y) akan meningkat sebesar 28,4%.

2. Uji-t

Tabel 4. Hasil Uji-t

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	

1	(Constant)	26,517	3,160		8,392	,000
	Keuangan Desa	,284	,094	,323	3,018	,003
a. Dependent Variable: Pembangunan Infrastruktur						

Berdasarkan Tabel 4. hasil pengujian yang telah dilakukan diatas, hasil analisis regresi diperoleh nilai t-hitung $3.018 > t\text{-tabel } 1,664$ dan nilai signifikan $0,003 < 0,05$ maka dapat di simpulkan bahwa variabel pengelolaan Keuangan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Wonggarasi Barat Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinasi merupakan suatu nilai yang besarnya berkisar antara 0%-100%. Untuk mengetahui besarnya koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 5. Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,323 ^a	,105	,093	2,227
a. Predictors: (Constant), Pengelolaan Keuangan Desa				
b. Dependent Variable: Pembangunan Infrastruktur				

Sumber : Data primeryang di olah, SPSS 2024

Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi pada tabel diatas, di ketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R) sebesar 0,323 yang berarti terdapat korelasi/hubungan antara pengelolaan Keuangan desa dengan pembangunan infrastruktur memiliki hubungan sebesar 32,3%. Sedangkan R square sebesar 0,105 hal ini dapat di artikan bahwa variasi atau variabel pembangunan infrastruktur (Y) dapat di jelaskan atau di pengaruhi oleh variabel Pengelolaan Keuangan desa (X) sebesar 10,5%. Sementara untuk sisanya sebesar 89,5% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak di bahas dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Dari hasil pengujian hipotesis diatas menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara pengelolaan Keuangan desa terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Wonggarasi Barat Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato. Dibuktikan dengan besarnya perhitungan uji-t dimana nilai signifikasi 0,003 Lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pengelolaan dana desa mempengaruhi pembangunan infrastruktur. Artinya dalam variabel pengelolaan Keuangan desa Hipotesis (H_a) di terima.

Hasil dari perhitungan grand mean skor tanggapan responden mengenai variabel Pengelolaan Keuangan Desa pada indikator Transparansi terdapat nilai yang terendah yaitu pada pernyataan X2 yang di mana pernyataannya yaitu

“Pemerintah selalu melaporkan progres/kemajuan pelaksanaan pengelolaan keuangan”. Dari hasil pernyataan ini menunjukkan bahwa ada kekurangan dalam pelaporan progres atau kemajuan pengelolaan keuangan oleh pemerintah. Artinya, pemerintah mungkin tidak cukup terbuka atau rutin dalam menginformasikan kepada publik mengenai bagaimana keuangan dikelola dan sejauh mana pencapaian target atau hasil yang telah dicapai.

Kemudian pada indikator Akuntabel, terdapat nilai yang terendah yaitu pada pernyataan X4 yaitu “Tahapan pengelolaan keuangan Dana Desa melibatkan unsur-unsur masyarakat”. Dari hasil Pernyataan ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan keuangan Dana Desa tidak menunjukkan keterlibatan yang memadai dari unsur-unsur masyarakat dalam setiap tahapan. Tanpa keterlibatan masyarakat, mekanisme kontrol sosial menjadi lemah. Hal ini dapat mengurangi akuntabilitas karena tidak ada pengawasan yang memadai dari pihak yang akan langsung merasakan dampak dari pengelolaan dana.

Selanjutnya indikator partisipasi terdapat nilai yang terendah yaitu pada pernyataan X8 “Masyarakat terlibat secara aktif dalam rapat paripurna pembahasan dan penetapan anggaran desa. Dari hasil Pernyataan ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat yang tidak terlibat secara aktif dalam rapat paripurna untuk pembahasan dan penetapan anggaran desa. Ini berarti ada kekurangan dalam keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait anggaran, yang penting untuk memastikan bahwa kepentingan dan kebutuhan masyarakat tercermin dalam perencanaan anggaran desa.

Hasil dari perhitungan grand mean skor tanggapan responden mengenai variabel Pembangunan Infrastruktur pada indikator Peningkatan Aksesibilitas terdapat nilai yang terendah yaitu pada pernyataan Y2 “Infrastruktur dapat menunjang kegiatan masyarakat”. Dari hasil Pernyataan ini menunjukkan bahwa infrastruktur saat ini belum cukup memadai untuk mendukung aktivitas masyarakat secara optimal. Untuk meningkatkan aksesibilitas, perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap infrastruktur yang ada dan merencanakan perbaikan yang diperlukan agar dapat lebih baik memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kemudian pada indikator Pemenuhan Kebutuhan Dasar terdapat nilai yang terendah yaitu pada pernyataan Y4 yaitu “Masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan infrastruktur”. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat belum diberikan kesempatan yang cukup untuk berpartisipasi atau berkontribusi secara aktif dalam proyek-proyek infrastruktur. Kurangnya keterlibatan masyarakat dapat mengakibatkan kurangnya dukungan dan pemahaman tentang proyek, serta potensi ketidaksesuaian antara proyek yang dilaksanakan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar, penting untuk memperbaiki mekanisme partisipasi masyarakat sehingga mereka dapat berperan aktif dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi.

Keterkaitan antara teori Stewardship dengan penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran penting pemerintah desa sebagai entitas yang transparan dan

akuntabel. Teori Stewardship mendukung ide bahwa sebuah perusahaan harus memberikan informasi yang jelas dan terbuka, memenuhi semua peraturan yang ada serta bertanggung jawab terhadap masyarakat dimana pemerintah tersebut beroperasi.

Penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh M.A Perdana Putra (2023) diperoleh Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa aparat desa dan partisipasi masyarakat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan desa. Selanjutnya penelitian DS Sholekhah (2022) dan J.K mangeto (2018) yang hasil penelitiannya diperoleh dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan infrastruktur desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, diketahui bahwa pengelolaan keuangan desa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Wonggarasi Barat Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato. Koefisien positif dan signifikan dari penelitian ini menunjukkan bahwa apabila dana desa dari pemerintah pusat dikelola dengan baik oleh pemerintah desa, maka akan berdampak positif pada peningkatan pembangunan infrastruktur desa. Ini sesuai dengan salah satu tujuan utama dana desa yaitu pembangunan infrastruktur. Penggunaan dana desa harus dioptimalkan dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang mendesak untuk dilaksanakan, serta yang paling dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan mayoritas masyarakat desa.

Saran

Kepada pemerintah desa Wonggarasi Barat Kecamatan Lemito Kabupaten pohuwato, untuk dapat memaksimalkan penggunaan keuangan desa dalam pembangunan desa, perlu melibatkan masyarakat dalam perencanaan program desa dan meningkatkan partisipasi mereka agar pembangunan dapat berjalan dengan optimal. Selain itu, pemerintah desa harus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana desa kepada masyarakat. Hal ini sangat penting untuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Kepada peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, agar dapat mengkaji variabel lain yang dapat mempengaruhinya dengan mengkaji isu-isu karena koefisien determinasi yang diperoleh dalam penelitian ini 10,5%, yang berarti masih ada 89,5% variabel lain yang mampu mempengaruhi pembangunan infrastruktur.

DAFTAR PUSTAKA

Alandino, A. K. (2022). Implementasi Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Studi Kasus Di Desa Pandian Kecamatan Sumenep). *Dinamika*, 28(11), 4790-4810.

- Diqi, M. A. (2020). Implementasi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Penggunaan Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. *Dinamika*, 26(15), 1868-1877.
- Dydha, D. O. (2018). Analisis Pengaruh Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Randuagung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik) (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Gunawan, T. (2022). Pengaruh Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi kasus di Kecamatan Balaraja) (Doctoral dissertation, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten).
- Husein, H., & Latue, D. M. (2022). Implementasi Penerapan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Wayame Kota Ambon Provinsi Maluku). *Kupna Akuntansi: Kumpulan Artikel Akuntansi*, 2(2), 81-94.
- Indonesia, P. R. (2014). Undang-undang Desa nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Lembaran Negara Republik Indonesia *Sekretariat Negara*.
- Jeddawi, M., & Rahman, A. (2018). Studi Kemungkinan Perubahan Status Desa Teluk Kapuas Menjadi Kelurahan Di Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 3(1).
- Kiesanto, A. (2022). Implementasi Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Studi Kasus Di Desa Pandian Kecamatan Sumenep).
- Korry, I. N. S. (2018). Revisi Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Sebagai Wujud Implementasi Perimbangan Keuangan Yang Adil Dan Selaras. *Kertha Wicaksana*, 12(1), 76-79.
- Mangeto, J. K. (2018). Analisis Pengaruh Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Taripa Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso) (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Mlik, O., Renouw, AA, & Banea, A. (2022). Pengaruh Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Pada Kampung Klawaren, Distrik Wemak, Kabupaten Sorong. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11 (03), 998-1007.
- Muhamad Fikri, F. (2023). Implementasi Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Di Desa Malai V Suku Timur Kecamatan Batang Gasan Kabupaten Padang Pariaman Perspektif Fiqih Siyasah (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Nomor, P. P. (72). tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa. *Jakarta: Depdagri*.
- Putro, H. S., & Kartini, N. H. (2020). Implementasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 Berdasarkan Permendes Nomor 16 Tahun 2018 Tentang

Economic Reviews Journal

Volume 3 Nomor 4 (2024) 1920 – 1930 E-ISSN 2830-6449

DOI: 10.56709/mrj.v3i4.574

- Priorotas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Di Desa Kanamit Barat Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau. *Anterior Jurnal*, 19(2), 55-65
- Sani, Y. K. A. (2023). Pengaruh Dana Desa Pembangunan Infrastruktur, Pemberdayaan Masyarakat, dan Tingkat Pendidikan terhadap Pendapatan Masyarakat di Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Setiawan, P., Badaruddin, B., & Amin, M. (2022). Analisis Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Permendes PDTT Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. *PERSPEKTIF*, 11(2), 718-734.
- SHOLEKHAH, D. S. (2022). Penagaruh Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa Terhadap pembangunan Infrastrktur Pada Kecamatan Sinar Peninjauan (Doctoral dissertation, 021008-Universitas Tridinanti Palembang).
- Silitonga, H. P., Sianipar, R. T., Sembiring, L. D., Putri, J. A., & Siregar, R. T. (2022). Effectiveness Of Village Fund Policy For Economic Development And Rural Infrastructure In Siantar District Simalungun Regency *Sultanist: Jurnal Manajemen dan Keuangan*, 10(1), 98-107.
- Sugiyono. 2019, Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. bandung: Alfabeta. *Procrastination And Task Avoidance: Theory, Research and Treatment. New York: Plenum Press, Yudistira P, Chandra, Diktat Ku.*
- Takafa, E6. (2021). Penyerapan Dana Desa Tahun 2018 Untuk Pembangunan Infrastruktur Di Desa Dalam Perspektif (PP No 60 Tahun 2014) Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN (Studi Kasus Desa Dalembalar Kec. Cimanuk Kab. Pandeglang, Banten) (Doctoral dissertation, UIN SMH BANTEN).
- Wirahadi Ahmad, A., & Septriani, Y. (2008). Konflik keagenan: tinjauan teoritis dan cara menguranginya. *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, 3(2), 47-55.
- Yondaningtiyastuti, S. (2022). Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK)*, 4(3), 177-190.